

IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA SRI BINTAN KECAMATAN TELUK SEBONG

Chyntia Apulina Karina Surbakti¹, Edy Akhyary², Edison³
Chintyaapulina21@gmail.com

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik , Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Implementation of the Community-Based Water Supply and Sanitation Program (PAMSIMAS), water supply in Sri Bintan Village is very limited. This study aims to determine the process of implementing the Community-Based Drinking Water and Sanitation Provision (PAMSIMAS) program in Sri Bintan Village and what factors influence the implementation of the program. The results of this study are assessed from the indicators consisting of (1) standards and policy targets already have clear standards but the implementation process is not yet appropriate. (2) human resources and financial resources are not yet available as needed. (3) the characteristics of the implementing organization are in accordance with the characteristics of already knowing the responsibilities and duties of each. (4) the attitude of the implementers has not been optimal because the PAMSIMAS management body has not carried out its duties properly, such as checking infrastructure and paying dues to the community. (5) communication between organizations and implementers cannot be said to be optimal because the district person in charge does not have the right time to visit or check Sri Bintan Village. and (6) economic, social & political conditions. It is not optimal because it is still lacking and the socialization is not evenly distributed. Researchers provide suggestions for improving the process of implementing the PAMSIMAS program, improving the performance and sense of professionalism of the implementers, as well as increasing community participation in caring for and maintaining the facilities provided.

Keywords: Program implementation, drinking water supply

I. Pendahuluan

Kebijakan pembangunan pada hakikatnya haruslah bersifat adil, demokrasi, terbuka, partisipatif, dan terintegrasi, sehingga kesenjangan pembangunan daerah yang ada saat ini dapat teratasi. Untuk mengatasi suatu ketertinggalan di daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah itu sendiri. Dalam sebuah pembangunan diperlukan suatu pembangunan yang menyeluruh, mulai dari pembangunan sektor kecil pembangunan tingkat desa dengan berbagai faktor permasalahan di desa yang dilanjut ke tingkat permasalahan yang lebih tinggi ke tingkat Kabupaten/Kota dan Nasional. Pelaksanaan program PAMSIMAS dilandasi dengan kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJPN mengamanatkan pada akhir periode RPJM 2015-2019 layanan dasar air minum dan sanitasi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Di dukung dengan beberapa payung hukum utama yang berkaitan dengan pengelolaan program PAMSIMAS antara lain:

1. PP No. 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum.
2. PP No. 69 Tahun 2014 tentang hak guna air.
3. Perpres No. 185 Tahun 2014 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi.
4. Permenkes No. 3/2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dimana penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Maksimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mendukung kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi SPM tersebut, program PAMSIMAS berperan dalam menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Program PAMSIMAS merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat dengan dukungan Bank Dunia untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui media air dan lingkungan.

Secara nasional provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah provinsi dengan jumlah kabupaten sasaran, dipilih sebagai salah satu lokasi penerima program PAMSIMAS dengan pertimbangan akses masyarakat terhadap sarana air minum dan sanitasi tergolong masih rendah. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu lokasi program PAMSIMAS sejak tahun 2014. Lokasi kabupaten dan jumlah desa pelaksanaan PAMSIMAS Sampai dengan tahun ini (2019) dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	KABUPATEN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	JUMLAH
1	KARIMUN	10	10		10	10	7	46
2	NATUNA	10	10		14	12	8	54
3	ANAMBAS				5	11	15	31
4	LINGGA				5	10	15	30
5	BINTAN				5	9	6	20
JUMLAH		20	20	0	39	52	50	181

Tabel 1 Jumlah desa pelaksanaan PAMSIMAS provinsi KEPRI 2014-2019

Program PAMSIMAS merupakan program pemberdayaan masyarakat yang kegiatannya meliputi antara lain pembangunan sarana air bersih, sanitasi baik di masyarakat maupun di lingkungan sek olah. Adapun kriteria terpilihnya desa yang akan dijadikan tempat pelaksanaan program PAMSIMAS yaitu:

1. Indeks Kemiskinan Desa yang Tinggi
2. Desa yang Terbatas Akses Air Terhadap Air Minum atau Rawan Air
3. Desa yang Terbatas Akses Sanitasi
4. Desa dengan Prevalensi Diare atau Penyakit yang terkait dengan Air Tinggi
5. Desa yang Belum Mendapatkan Proyek Sejenis (Air Minum dan Sanitasi) dalam Dua Tahun Terakhir
6. Bersedia berkontribusi 20% (4% *in-cash*, 16% *in-kind*)

Berdasarkan kriteria diatas Desa Sri Bintan merupakan salah satu lokasi yang terpilih untuk program PAMSIMAS di Kabupaten Bintan untuk tahun anggran 2017. Penjelasan tentang rincian juga dilakukan di seluruh anggota masyarakat di desa Sri Bintan. Pertemuan musyawarahnya menjangkau seluruh anggota masyarakat desa dan perangkat desa sehingga tidak cukup dilakukan

hanya satu kali. Badan Pengurus PAMSIMAS adalah masyarakat yang sudah menghibahkan tanahnya untuk menjadi lokasi bangunan sarana prasarana PAMSIMAS.

Pelaksanaan program PAMSIMAS di Desa Sri Bintang sudah berjalan hampir setahun (11 bulan) proses pengimplementasiannya menghabiskan waktu setahun. Desa Sribintan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.930 jiwa yang tersebar di 3 dusun dengan jumlah 5 wilayah RW dan 16 wilayah RT. Jumlah masyarakat desa Sribintan disetiap dusunnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama Dusun	Jumlah penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
SATU	434	423	857
DUA	434	381	815
TIGA	133	125	258
Total	1.001	929	1.930

Tabel 2 Data Kependudukan Desa Sri Bintang Kecamatan Teluk Sebong

Dilihat dari keadaan sosial ekonomi dan klasifikasi kesejahteraan masyarakat setempat, maka komposisi kesejahteraan masyarakat, terbagi menjadi tiga bagian yaitu masyarakat kaya, masyarakat sedang, masyarakat miskin. Masyarakat yang menikmati layanan program PAMSIMAS masih sangat sedikit pada desa Sribintan hanya 38 keluarga yang terlayani oleh program PAMSIMAS, sedangkan keluarga yang lainnya hanya menggunakan sumur pribadi ataupun mengaliri air dari gunung.

Desa Sri Bintang kesulitan memperoleh air bersih, khususnya dimusim kemarau. Akses masyarakat terhadap air bersih belum memadai karena masyarakat masih menggunakan sumur dan ada beberapa keluarga yang menggunakan air Gunung Demit. Akses air bersih merupakan hak setiap warga negara. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pemerintah berkewajiban menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh air bersih UU No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Pasal 5 menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif. Sementara itu untuk akses sarana sanitasi desa Sribintan masyarakat Sudah memiliki kesadaran yang tinggi.

Masyarakat Sri Bintang lebih banyak meluangkan waktu untuk melaksanakan kegiatan produktif dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sehingga mereka kurang memperhatikan pengelolaan oprasional PAMSIMAS, kurang pedulinya masyarakat terhadap kondisi bangunan sarana prasarana PAMSIMAS, dan pada saat musim kemarau masyarakat Desa Sri Bintang selalu kekurangan air karena debit air PAMSIMAS tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Selain permasalahan dari sarana prasarana masalah lainnya adalah terjadinya kekosongan Badan Pengurus PAMSIMAS. Badan pengurus PAMSIMAS memiliki salah satu persyaratan adalah pengurus dari yang sudah menghibahkan tanahnya untuk menjadi tempat sarana prasarana seperti bak utama.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti pendekatan kualitatif dengan metode penelitian dekskriptif. Karena lebih menekankan pada proses dari pada hasil, sehingga peneliti memiliki peluang dalam mengungkap peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi dilapangan. Dengan memakai pendekatan ini

maka data-data yang diperoleh adalah nyata karena didapatkan langsung dari sumbernya dan peneliti berhubungan langsung dengan subjek dan objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah agar program pamsimas dapat terus berlanjut dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat desa Sribintan sehingga tidak ada lagi kekosongan Badan Pengurus diPAMSIMAS. Alasan Penelitian ini dilakukan di Sribintan karena desa SriBintan pada tahapan pengimplementasikan Program PAMSIMAS belum berjalan maksimal untuk di akses seluruh masyarakat. Penelitian menfokuskan untuk implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong untuk mengumpulkan data yang diperlukan peneliti melakukan observasi, wawancara, dan studi literature. Berkaitan dengan informan yang sangat berpengaruh dalam penelitian ini yaitu Penanggung Jawab PAMSIMAS Kabupaten , apatarur desa Sri Bintan, Pengelola PAMSIMAS Desa Sri Bintan , serta tokoh masyarakat.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman yaitu suatu aktivitas yang meliputi data reduksi, penyajian data, dan kesimpulan dan verifikasi. Untuk lebih memahami teknik tersebut, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Reduksi

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam hal tersebut, ketika peneliti memperoleh data dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, selanjutnya peneliti mendisplaykan data yang berarti mengorganisir data, menyusun data dalam suatu pola hubungan sehingga semakin mudah difahami.. Dengan demikian, hasil dari data display ini mampu memudahkan peneliti dalam upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dalam hal tersebut, peneliti berusaha dan berharap kesimpulan yang dicapai mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

III. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan program PAMSIMAS dilandasi dengan kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJPN mengamanatkan pada akhir periode RPJM 2015-2019 layanan dasar air minum dan sanitasi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Program PAMSIMAS merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat dengan dukungan Bank Dunia untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui media air dan lingkungan.

Hasil analisis implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong dilihat dari penilaian indikator keluaran program mengacu pada teori implementasi menurut Van Metter dan Van Horn bahwa keberhasilan dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 6 (enam) variabel yakni : standart dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecendrungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana, dan variabel lingkungan ekonomi, sosial politik. Berdasarkan teori ini proses implementasi kebijakan diawali dengan output kebijakan dari badan-badan pelaksana, yang kemudian membentuk kepatuhan kelompok sasaran terhadap output kebijakan tersebut yang menghasilkan dampak nyata dari output kebijakan dan untuk melihat apakah dampak

tersebut sesuai dengan sebagaimana persepsi atau sebaliknya. Berikut ini penjabaran secara rinci dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti:

1. Standart dan Tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di tingkat pelaksana kebijakan, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadi konflik diantara para agen implementasi. Standart dan tujuan kebijakan, Penanggung Jawab PAMSIMAS kabupaten Bintan sudah memiliki standart dan tujuan yang jelas dalam menjalankan tugas nya sesuai dengan peraturan Pementintah. bahwa memang masyarakat sebagai sasaran utama di dalam pembuatan suatu kebijakan oleh pemerintah, yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya tentu saja kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan dari Program Pamsimas ini adalah masyarakat. Dimana masyarakat menjadi penerima pelayanan dari Pamsimas tersebut, dan para pelaksana ataupun penyelenggara dalam Program Pamsimas. Karena tujuan dari program Pamsimas ini adalah untuk meningkatkannya akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat, baik masyarakat dipedesaan yang memiliki kekurangan cakupan air bersih dan air minum serta masyarakat miskin

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Artinya sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia, yang mana dalam implementasi kebijakan disini sebagai orang atau kelompok orang selaku agen pelaksana kebijakan. Kemudian sumber daya finansial, sumber daya waktu, dan sumber daya sarana prasarana juga mendorong dan memperlancar kebijakan yang efektif.

ketersediaan jumlah sumber daya manusia khususnya di desa sri bintang sangat terbatas hal ini di karenakan kurang maunya atau aktifnya masyarakat desa untuk ikut serta dan mengambil bagian dari program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Tim pelaksana dalam program PAMSIMAS disusun dan dibentuk dari tingkat yang paling tinggi sampai ke tingkat yang paling rendah, dimana dibentuk tim koordinator dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa, begitu juga dengan tim fasilitatornya, karena program PAMSIMAS merupakan program yang ditujukan untuk masyarakat desa, maka pada dasarnya tim pelaksana sebageian besar dari aparat desa atau masyarakat setempat saja. Kemudian berdasarkan hasil penelitian, sumber daya finansial yang dimiliki juga belum mencukupi dan sangat terbatas karena hanya bersumber dari kutipan iuran dari masyarakat saja pemerintah hanya mendanai pada tahap awal pengimplementasian Program PAMSIMAS ini, di lihat dari kebutuhan masyarakat untuk mengurus atau merawat sarana Prasana PAMSIMAS ini keseluruhan iuran yang dikutp tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan.

3. Karateristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

Penanggung jawab PAMSIMAS kabupaten dan badan pengurus harian PAMSIMAS di Desa Sri Bintan dapat dilihat Struktur organisasi memegang peranan yang sangat penting

terhadap implementasi kebijakan, karena berkaitan dengan prosedur, sistem kerja, pembagian kerja, wewenang dan koordinasi antar instansi. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri dari struktur organisasi ini kita dapat melihat karakteristik agen pelaksana bagaimana hubungan yang menjalin antar unit pelaksana PAMSIMAS Kabupaten Sribintan dengan instansi lain. Untuk pelaksanaan program PAMSIMAS ini para pelaksana memang sesuai dengan bidangnya, selain itu juga dilakukan sosialisasi oleh penanggung jawab PAMSIMAS kabupaten untuk meningkatkan kualitas pelayanan PAMSIMAS.

4. Sikap atau kecendrungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Terdapat tiga unsur tanggapan pelaksana yang mempengaruhi kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan kebijakan, yakni: Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan terpengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Kognisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan. Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Sikap para pelaksana PAMSIMAS di desa Sri Bintan kecamatan Teluk Sebong sudah cukup baik. Dimana pelaksana kebijakan ini sudah menyadari akan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana PAMSIMAS dan juga harus ada komitmen dalam menjalankan tugas oleh para pelaksana kebijakan. Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan suatu hal yang penting. Walaupun pada prakteknya masih terdapat kekurangan. Seluruh pengelola sudah memiliki tanggung jawab masing-masing. Selain itu seorang implementor harus bisa merencanakan strategi yang akan digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Maka gambaran komitmen dan kejujuran sangat diperlukan untuk melihat konsistensi antara pelaksana kegiatan dengan agen yang ditunjuk.

5. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi nya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Koordinasi dalam implementasi kebijakan merupakan sebuah mekanisme yang dapat diterapkan dan perlu adanya dukungan dalam sebuah program yang tertera dalam rencana kerja semakin baik koordinasi yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis daerah dan atasan mengenai program yang akan dilaksanakan mendapatkan keberhasilan sesuai yang di targetkan.

Hubungan komunikasi antar organisasi antara penanggung jawab kabupaten dan aparat desa berjalan sangat lancar tidak pernah ada kendala. Setiap Organisasi yang terlibat sudah sangat mengerti tugas dan fungsi masing-masing sehingga dapat menjalankan hubungan komunikasi dengan baik. Yang menjadi kendala di indikator komunikasi ini adalah kurang ikut serta nya masyarakat dalam berpartisipasi terkait program ini masyarakatnya kurang partisipasi dan ambil tahu terkait pamsimas, untuk diminta datang dalam pertemuan membahas pamsimas pun tidak banyak masyarakat yang datang

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Lingkungan ekonomi perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan, dengan melihat sejauh mana lingkungan eksternal mempengaruhi dan mendorong keberhasilan kebijakan. Pemerintah daerah dalam mendorong meningkatkan pelayanan kesehatan, melainkan juga memperhatikan ekonomi masyarakat. Sebagaimana sangat perlu diperhatikan agar suatu kebijakan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan

Terkait kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa jika dilihat dari segi lingkungan ekonomi sudah bisa dikatakan maksimal. program PAMSIMAS ini pada tahap pembangunan sarana prasarana masyarakat tidak ada sedikitpun dikenakan atau di pungut biaya jadi tinggal menikmati hasil, setelah PAMSIMAS berjalan pada 6 bulan pertama gratis dan setelah itu baru bayar 7000/bulan untuk perawatan sarana prasarana. Dengan adanya program ini perekonomian masyarakat pasti sangat terbantu sekali.

IV. Kesimpulan

Implementasi Program Penyediaan Air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di desa Sri Bintang kecamatan Teluk Sebong dapat menyimpulkan program PAMSIMAS di desa Sri Bintang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah tetapi pada saat pengimplementasian yang dilaksanakan belum dapat dikatakan berhasil dan berjalan optimal dan terdapat beberapa faktor penghambat. Berbagai temuan dilapangan diketemukan bahwa di dalam implementasinya terdapat,

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Pada indikator ini Penanggung Jawab PAMSIMAS kabupaten Bintang sudah memiliki standar yang jelas dan sudah menjalankan tugasnya akan tetapi pada proses pelaksanaannya, standart dan ukuran kebijakan tersebut belum tepat sarsaran dikarenakan lokasi sarana yang tidak memungkinkan seperti yang di minta oleh masyarakat di desa Sri Bintang Kecamatan Teluk Sebong.
- b. Sumber Daya Berdasarkan indikator sumber daya dapat diketahui bahwa untuk faktor sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya Financial untuk menjalankan program-program yang sudah direncanakan. Untuk sumber daya manusia masih sangat terbatas hal ini dilihat dari pernah terjadinya kekosongan Badan Pengurus PAMSIMAS desa Sri Bintang. Sedangkan sumber daya financial juga masih sangat minim di karena ketebatasan Badan Pengurus PAMSIMAS dalam menutip uang iuran kepada masyarakat pengguna belum terjadwal.
- c. Karakteristik Agen Pelaksana Pada indikator ini karakteristik agen pelaksana Penanggung Jawab PAMSIMAS kabupaten bintang dan Badan Pengurus PAMSIMAS desa Sri Bintang sudah sesuai dengan karakteristik dan sudah semua dilibatkan baik penanggung jawab kabupaten, badan pengurus PAMSIMAS di Desa Sri bintang, aparatur desa dan seluruh masyarakat desa Sri Bintang. Tetapi harus lebih di tingkatkan lagi agar tujuan program PAMSIMAS ini tercapai.
- d. Sikap Atau Kecendrungan Para Pelaksana Pada indikator ini tanggapan maupun pemahaman sikap pelaksana dalam menwujudkan tujuan Program PAMSIMAS desa Sri Bintang Sudah cukup baik karena pelaksana kebijakan ini sudah menyadari akan tugas dan fungsi dan tanggungjawab nya sebagai pelaksana. Tetapi pada pengimplentasian dan yang terjadi di lapangan masih terdapat kekurangan dari Pihak Penanggung Jawab PAMSIMAS kabupaten yang masih belum memiliki jadwal yang tetap untuk turun kelapangan, begitu juga Badan pengurus PAMSIMAS juga belum melaksanakan tugasnya secara optimal seperti mengutip iuran, melakukan perawatan sarana prasana PAMSIMAS.

- e. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana Pada indikator ini hubungan antar organisasi Penanggung Jawab PAMSIMAS kabupaten Bintan dan Badan Pengurus PAMSIMAS desa Sri Bintan belum dikatakan optimal karena penanggung Jawab PAMSIMAS kabupaten bintan tidak melakukan kunjungan secara rutin dan pada tahap proses pengimplementasian PAMSIMAS di desa Sri Bintan terjadi kesalah pahaman. komunikasi atara pihak penanggung Jawab PAMSIMAS kabupaten dengan masyarakat setempat juga belum bisa dikatakan berhasil dikarenakan hal ini kurangnya peran serta masyarakat didalam mensukseskan Program pemerintah dan kurang optimalnya proses sosialisasi dan partisipasi dari masyarakat sehingga maksud dan tujuan dari program tersebut belum tersampaikan secara merata keseluruh lapisan masyarakat.
- f. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik Pada indikator ini lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam ranah implementasi bisa dikatakan belum optimal dikarenakan masih kurang dan belum merata nya sosialisasi yang dilakukan, penerimaan air PAMSIMAS yang juga tidak merata di akses oleh masyarakat dikarenakan faktor alam dan yang lain-lain. Dalam implementasinya, seluruh kegiatan PAMSIMAS dilakukan dan diawasi sendiri oleh masyarakat Desa Sri Bintan.

V. Daftar Pustaka

BUKU:

- Buku Pedoman Program *Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat* (Program Pamsimas). (2019). Kepri: Departemen Pekerjaan Umum
- H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis* (E. A. Purwanto (ed.); 1st ed.). GAVA MEDIA.
- Moleong. Lexy, J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tirtaprima, R. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Kepala Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala. *Jurnal Katalogis*, 5(8), 20–28.
- Wibawa. Samudra. Et.Al. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2012 *Kebijakan Publik Teori, Proses,dan Studi Kasus*. Jakarta: PT Buku Seru

JURNAL:

- Chaerunnissa, chika. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Brebes (Studi Kasus Desa Legok dan Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung)*. Jurnal politika Vol. 5, No.2

T. Moch. Nazar,dkk. 2018. *Evaluasi Keberhasilan Pengelolaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Aceh Besar*. Jurnal teknik sipil volume 1 nomor 4

Suroso. 2016. *Implementasi Kebijakan Pamsimas Dalam Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakatdi Kabupaten Pati*. Jurnal litbang Vol XII No 1

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

UU No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Permenkes No. 3/2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).

Perpres No. 185 Tahun 2014 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi.

PP No. 12 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum

PP No. 69 Tahun 2014 tentang hak air guna

VI. Ucapan Terimakasih

Terimakasih untuk keluarga, serta dosen pembimbing utama bapak Dr. Edy Akhyary, S.Sos., M.Si dan dosen pembimbing kedua bapak Edison, S.AP., MPA yang sudah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dan teman-teman seperjuangan yang sudah sudi membantu dalam proses ini, serta ribuan terimakasih penulis hanturkan kepada penanggung jawab PAMSIMAS Kabupaten Bintan, aparaturnya Desa Sri Bintan, pengelola Bp-Spam PAMISIMAS desa Sri Bintan, serta tokoh masyarakat desa Sri Bintan yang sudah berkontribusi serta ikut membantu melancarkan penulisan artikel ini.